



dpmptsp
LUWU TIMUR
melayani anda, membangun bersama

LAKIP TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR
2022**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Luwu Timur dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 ini cakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Kami melaporkan pengukuran kinerja Tahun 2022 dari 6 program yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur Telah mencapai 97,63 dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2022 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Kedepan, Kami akan melakukan Berbagai perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang memuaskan.

Malili, 28 Februari 2023

KEPALA DPM-PTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 198703 1 208

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Kondisi Pegawai	4
1.5 Sistematika Penyajian	7
1.6 Isu-isu Strategis/Permasalahan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
2.1 Rencana Strategis	9
a. Tujuan dan sasaran	9
b. Indikator Kinerja Utama	10
2.2 Alokasi Anggaran	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan (good governance), diharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab (akuntabel) serta diharapkan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan instruksi priseden republic Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Laporan ini disusun dengan pedoman pada peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Timur pemerintah Kabupaten luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur terletak dikompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyusun Lakip Tahun 2022. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 Tahun.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis Tahun 2022 kepada stakeholder guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana

untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Peran dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah,

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II) dan terdiri atas:

- Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

1.4 Kondisi Pegawai :

Sumber Daya Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yaitu terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 20 Orang
- Tenaga Upah Jasa : 23 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa menurut data terakhir pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

Jumlah Pegawai dan upahjasa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Unit /Bidang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	2	6	-	8	-	16
2	Bidang Penanaman Modal	-	1	-	2	3	6
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	4	-	8	-	12
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	3	1	2	1	8
TOTAL		2	13	1	21	2	42

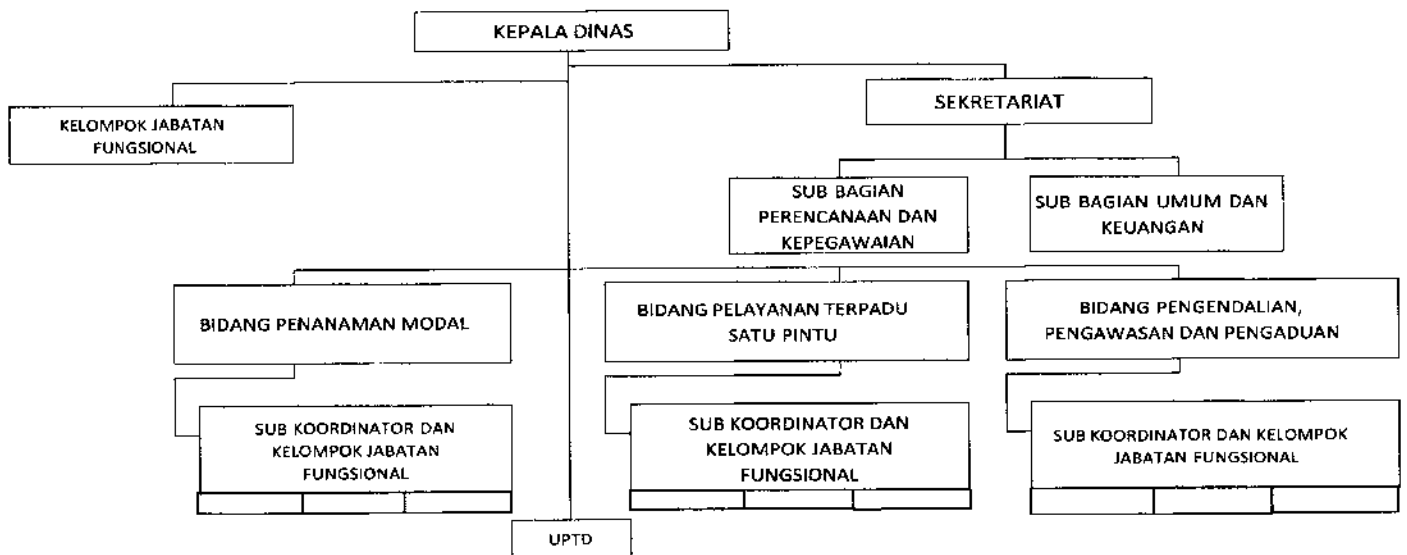
Tabel. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Sekretariat/Bidang	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	4	2	7
2	Bidang Penanaman Modal	-	-	3	1	4
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	3	-	4
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	-	4	1	5
TOTAL		0	2	14	4	20

Tabel 3
Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	9
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	4
	Jumlah	20

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata cara Reviu, atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi
- d. Kondisi Pegawai
- e. Sistematikan Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Perencanaan dalam Renstra 2021 - 2026
- b. Perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2021
- c. Program, Kegiatan dan Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

- a. Capaian Realisasi Kinerja Sampai tahun 2021
- b. Capaian Kinerja Organisasi
(Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Dana)
- c. Realisasi Anggaran
- d. Keberhasilan/Penghargaan

Bab IV Penutup

1.6 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa .
2. Terdapat kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana.
3. Realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN masih rendah karena penetapan rencana anggaran kas pada Tw.1 dan Tw.2 sebesar 70% dari pagu Gaji.
4. Terdapat kegiatan yang penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan (Riil Cost).
5. Data pendukung dari bidang yang belum maksimal
6. Pengisian formulir evaluasi oleh bidang masih belum maksimal.
7. Penyesuaian penggunaan aplikasi penatausahaan dari SIMDA ke SIMDANG, yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
8. Terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan berdasarkan anggaran kas

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dokumen Renstra DPMPTSP 2021-2026 mengacu kepada RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Misi Ke-2 RPJMD :

“Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas”

Misi Ke-4 RPJMD :

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TABEL 4.

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	82.00
3.	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	63.00 (B)	65.00 (B)	67.00 (B)	68.00 (B)	70.00 (B)	71.00 (BB)

TABEL 5.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	Triliun	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun	2,3 T	2,5 T	2,65 T	2,9 T	2,95 T	3 T
	Nilai Realisasi Investasi PM	Milyar	700 M	800 M	850 M	900 M	950 M	1 T
2.	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	%	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	82.00

2.2 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 6 program, 15 Kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan anggaran belanja Pegawai sebesar Rp. 2.474.135.003, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.255.045.128,- dan Belanja Modal Rp 10.000.000,-. Penetapan out put dan out come ada pada masing-masing kegiatan.

Adapun anggaran per program untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.

Program dan Pagu Anggaran DPMPSTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO	PROGRAM	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26	3.389.606.008
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3	406.846.885
3	Promosi Penanaman Modal	2	188.444.480
4	Pelayanan Penanaman Modal	2	307.191.107
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	417.091.801
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	29.999.850
Total			4.739.180.131

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indikator utama/ sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2021.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain Adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan diketahui oleh Bupati Luwu Timur. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur tahun 2022 disusun berdasarkan pedoman penyusunan penetapan kinerja.

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6:

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah (S1)	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	2.500.000 (Juta Rupiah)
		Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	800.000 (Juta Rupiah)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (S3)	Rata-rata Lama Penyelesaian Perizinan Usaha	72,00
3	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (S2)	Prestasi Nilai AKIP	65,00

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2022. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3.300.000.000. 000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	72,00
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
I.	Meningkatnya Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	33 Investor

II.	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN	2,5 Triliun 800 Milyar
b.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan		
1.	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	75 %
d.	Sekretariat		
1.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	92,01%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal	Persentase PMA/PMDn yang terfasilitasi	100%
2.	Terwujudnya Peta Potensi Investasi	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100 %
3.	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5 MoU
b.	Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2.	Terwujudnya Pengolahan serta penyajian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	- Persentase Data dan informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%
c.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya peningkatan nilai Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%
d.	Sekretariat		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi	100%

	daerah yang tersusun tepat waktu	tepat waktu	
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	100%
5.	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%
8.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
9.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Tersedianya Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi PM yang tersedia	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peta Potensi	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang dibuat	3 Dokumen
5.	Terlaksananya Pameran Promosi penanaman Modal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 Event
b.	Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu		
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik	- Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang	4.100 Izin 1.250 Izin

		diterbitkan izinnnya	
2.	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan
3.	Tersedianya data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	8 Kegiatan
2.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	217 Pelaku Usaha
3.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	14 Kegiatan
d.	Sekretariat		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen
5.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
6.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
7.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
8.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13 Orang
9.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	15 Jenis
10.	Tersedianya Peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1 Paket
11.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1 Paket

12.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis
13.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis
14.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exemplar
15.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	120 Orang
16.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	274 Kali
17.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit
18.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
19.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	900 Surat
20.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening
21.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Orang
22.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	9 Unit
23.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit
24.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
25.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	21 Orang
26.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

2.4 Program Utama DMPTSP

1. Untuk mewujudkan tujuan DPMTSP Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang harus dicapai, terdapat 5 (lima) program utama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

tersebut pada tahun 2022. Adapun program dan kegiatan utama untuk pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.

Program Utama DPMPSTP Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	% (ANGGARAN TOTAL BELANJA LANGSUNG)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	406.846.885	8,58
		2. Promosi Penanaman Modal	2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	188.444.480	3,97
		3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	417.091.801	8,80
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayan Perizinan dan Non Perizinan	4. Pelayanan Penanaman Modal	4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	307.191.107	6,48
		5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal	5. Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850	0,63

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati Luwu Timur. Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3,3 Triliun	4,092 Triliun	124%	○
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	72,00	82,24	114,22%	○
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai AKIP	63,00			

Keterangan : ○ Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Sasaran Strategis I
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Tabel 11.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 DPMTSP Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif di Daerah	a.	Total Nilai Investasi	Juta Rupiah	3.300.000	4.092.099	124,00
	1.	Nilai Investasi Modal Asing (PMA)	Juta Rupiah	2.500.000	2.947.236	117,88
	2.	Nilai Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	800.000	1.144.862	143,10

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022

Secara total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur terealisasi sebesar 124,00% atau sebesar Rp 4.092.099.248.242,- dari target sebesar Rp 3.300.000.000.000,-

Adapun Target Realisasi Investasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12.

Perbandingan Capaian Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN Kaupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2022

No	Jenis Investasi	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	PMA	2.300.000.000.000	3.604.254.631.433	156,69	2.500.000.000.000	2.947.236.398.569	117,88
2	PMDN	700.000.000.000	567.489.903.997	81,00	800.000.000.000	1.144.862.849.673	143,00
	TOTAL	3.000.000.000.000	4.171.744.535.430	139,06	3.300.000.000.000	4.092.099.248.242	124,00

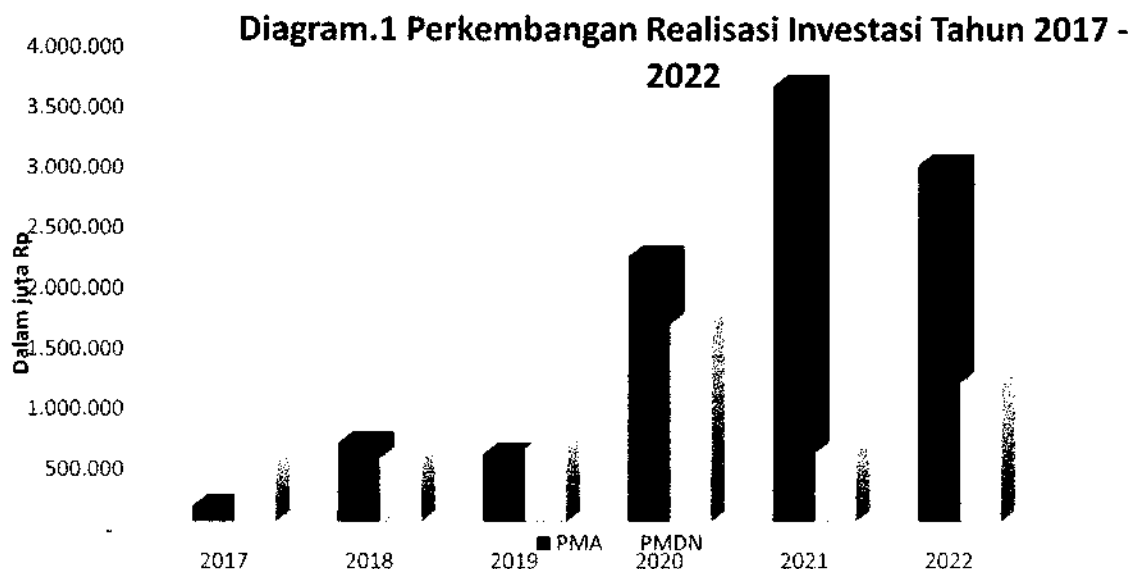
Dengan Rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah Investasi } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100 \%$$

$$\frac{(\text{Rp } 4.092.000.248.242 - \text{Rp } 4.171.741.535.430)}{\text{Rp } 4.171.741.535.430} \times 100\%$$

$$= (1.91 \%)$$

Target Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 dari 3 Trilyun bertambah di tahun 2022 sebesar 3,3T meningkat sebesar 110 % , sedangkan realisasi investasi tahun 2021 dari target 3.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.171.741.535.430 atau 139.06 % sedangkan Tahun 2022 dari target 3.300.000.000.000,- terealisasi sebesar 4.092.099.248.242 atau 124 % , sedangkan realisasi investasi dari tahun 2021 sampai dengan 2022 menurun sebesar 1.91 % , disebabkan karena adanya pelaku usaha PMA (PT. Mars dan Bau Hua) mengalami penurunan produksi sehingga sampai pada triwulan IV tahun 2022 melapor tetapi nilainya Kosong. (0), tetapi dari target dan realisasi investasi untuk tahun 2022 sudah tercapai. (dapat dilihat dari Tabel 12).



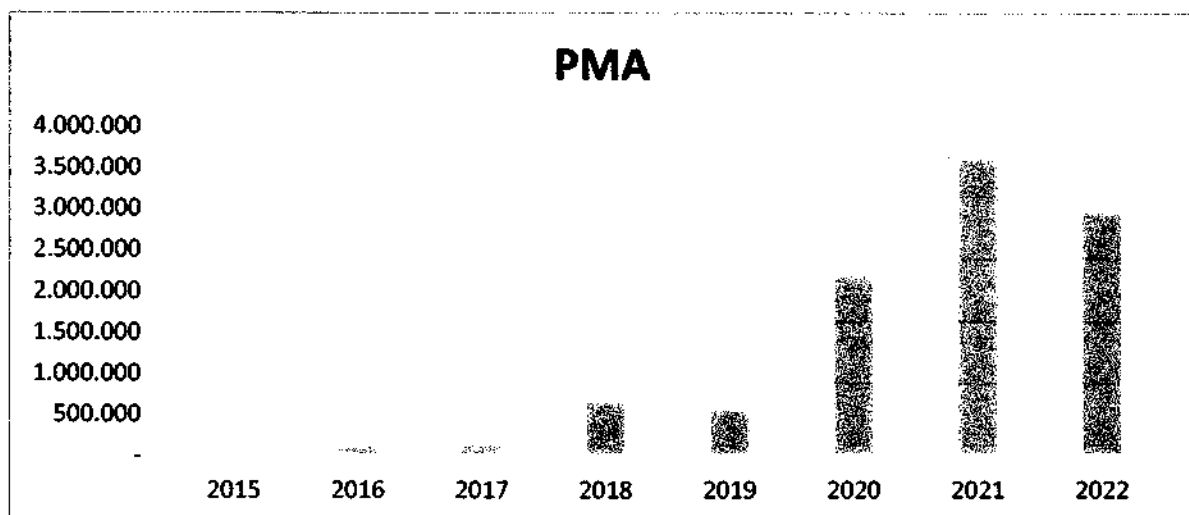
Tabel. 13
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017 – 2022
 (Rp. 000.000,-)

NO	INVESTASI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PMA	120.117	639.033	549.259	2.185.879	3.604.254	2.947.236
2	PMDN	452.245	516.916	598.559	1.636.201	567.486	1.144.862



Secara total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur terealisasi sebesar 124,00 % atau sebesar Rp 4.092.099.248.242,-. Pencapaian terjadi pada Nilai Investasi PMA, dapat dilihat pada realisasi capaian tahun 2022. Realisasi investasi PMA sebesar Rp 2.947.236.398.569,- dari target sebesar Rp 2.500.000.000.000,- atau sebesar 117,88%.

Diagram. 2
 Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 1 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2022



Penanaman Modal Asing (PMA)

Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang pertama yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Asing (PMA) dengan target Rp 2.500.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 2.947.236.398.569,- untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Asing dalam satu tahun dengan target Investasi Modal Asing dalam tahun bersangkutan dikalikan 100%. Capaian realisasi PMA sebesar 117,88% disebabkan oleh karena adanya penambahan Nilai Realisasi Proyek pada sektor pertambangan terutama pada PT. Vale serta peningkatan kepatuhan Perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk triwulan

III mengalami peningkatan 2 kali lipat dari triwulan I dan II. Untuk melihat lebih jelas pengukuran indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

Realisasi Investasi Modal Asing (PMA)

Uraian	Realisasi LKPM (\$)	Realisasi (Rp) Asumsi \$1 = Rp 15.617,-
1	2	3
PT. Vale	170.143.303	2.657.127.956.389,-
PT. Mars	1.091.434	17.044.928.612,-
PDS	137.671	2.150.000.000,-
Bao Hua Investment	-	-
Arkora Hydro	17.347.346	270.913.513.568,-
Total	\$ 188.719.754	Rp 2.947.236.398.569,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 (nilai tukar Kurs 1\$ = Rp 15.617)

Perkembangan realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan izin usaha ini sangat bergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha (PMA) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun – tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus di tingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dengan upaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan perizinan.

**Perbandingan Capaian Jumlah Investasi PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2022**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	0	-	0	Rp. 268.605.000.000
2017	21	-	21	Rp. 120.117.000.000
2018	34	-	34	Rp. 603.035.000.000
2019	13	-	13	Rp. 549.259.000.000
2020	8	-	8	Rp. 2.185.879.000.000
2021	8	-	8	Rp.3.604.254.631.433
2022	9	-	10	Rp.2.947.236.398.569

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilihat perbandingan hasil realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.

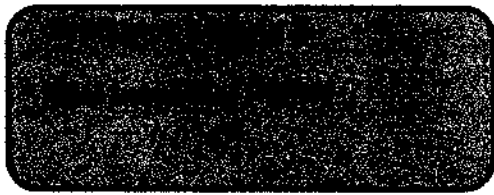
Indikator nilai investasi PMA pada Tahun sebelumnya (Tahun 2021) terealisasi sebesar Rp 3.604.254.631.433,- dengan target sebesar Rp 2.300.000.000.000,-, artinya capaian kinerja pada Tahun 2021 adalah 156,69% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi pada Tahun 2022 yang diperoleh sebesar Rp 2.947.236.398.569,- dengan target sebesar Rp 2.500.000.000.000 tercapai sebesar 117,88 %. maka terdapat penurunan sebesar Rp 657.018.232.864,-.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya (2021)

Indikator kinerja nilai investasi PMA pada tahun 2021, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 156,69%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 117,88% maka terjadi penurunan capaian persentase kinerja, tetapi hal ini disebabkan karena PT. Vale dan PT. Panca Digital Solutiom (PDS) mengalami penurunan produksi pada Tahun 2022;

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2026

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2021 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMA untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2026 adalah sebesar Rp.4.000.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMA sampai tahun 2022 sebesar Rp. 2.947.236.398.569,- dibandingkan dengan target akhir Renstra , maka telah mencapai 73,67%.

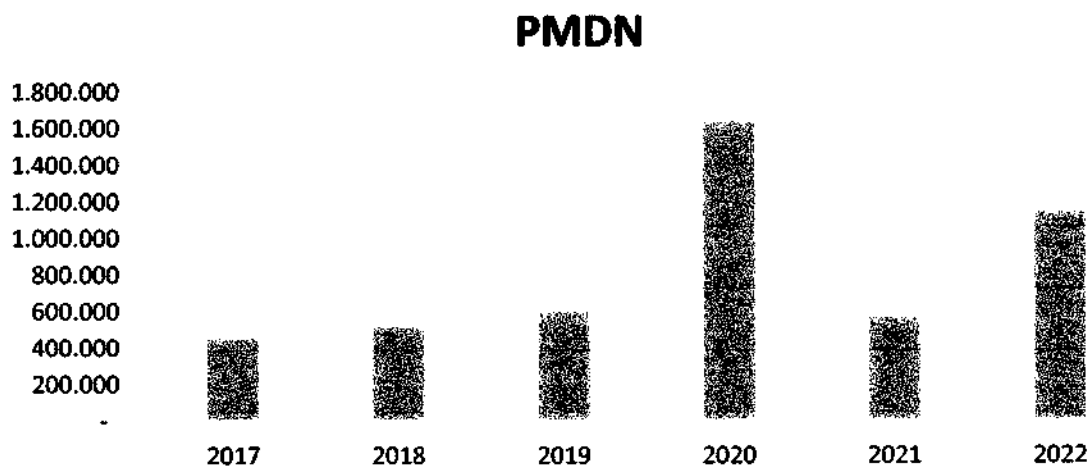


Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan target Rp 850.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 1.144.862.849.673,- untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Dalam Negeri dalam satu tahun dibagi dengan target Investasi Modal Dalam Negeri pada tahun tersebut dikalikan 100%. Nilai realisasi PMDN hanya mencapai realisasi sebesar 134,58% dari target PMDN Tahun 2022.

Diagram. 3

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 2 DPMTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2022



Tabel 15

Realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2022

Nama Perusahaan		Realisasi LKPM (Rp)
1		2
1	PT. GUNUNG VERBECK KAREBBE	22.000.000.000
2	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA	51.000.000
3	PT. MELATI SUKSES MANDIRI	300.000.000
4	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI	3.199.000.000
5	CV. MAHAPATI UTAMA	1.505.000.000
6	PT. SINAR ADHIO	80.000.000
7	PT. PUTRA WASUPONDA MANDIRI	754.000.000
8	PT. AOS ARROYAN JAYA	40.000.000
9	PT. RISTON BUMI MAHARDIKA	2.072.000.000
10	PT. TANA TIMUR PROPERTI	5.708.000.000
11	CV. DWI ANUGERAH PRATIWI	219.000.000
12	PT. PUMA JAYA UTAMA	4.158.500.000
13	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	2.496.500.000
14	PT. NICKEL PRIMA UTAMA	4.130.000.000
15	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	91.865.000
16	PT. TEGUH WIRA PRATAMA	695.909.383.455
17	PT. USU HYDRO POWER	40.080.515.681
18	CV. MAHAPATI UTAMA	215.000.000
19	PT. ARTA NAARGA PERSADA	93.000.000.000
20	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	1.625.000.000
21	PT. ANEKA JASA SOROWAKO	65.262.394.140
22	PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK	120.488.139.342
23	CV. ADYTIYO TANGGUH PERKASA	128.000.000
24	PT. KAHALA MINERA	1.489.301.128
25	PT. MAHARANI SYAM	-
26	CV. BENTENG RADIO SYSTEM	54.000.000
27	PT. LAUTAN INTAN MATANO	-
28	PT. ANGKASA JASA MULIA	403.739.261
29	PT. EPID MENARA ASSETCO	2.000.000.000
30	PT. FARISA UTAMA KONSTRUKSI	147.000.000
31	PO. SUHARYANTO	-
32	PT. INDOMARCO	-
33	PT. SUMBER WAHAU JAYA	220.000.000
34	PT. WIRANA BEVELINDO HUTAMA	300.000.000
35	PT. NICKEL PRIMA UTAMA	3.840.000.000
36	PT. HARRY PRATAMA SOROWAKO	506.000.000
37	PT. ANUGRAH ADHI SANTHY	400.000.000
38	PT. TRI ADETA PRATAMA	20.240.937
39	CV. QAIRAH PRATAMA	280.000.000
40	PT. DESTRA AIR MAS	1.000.000.000
41	PT. BUJAYA KARYA MAKMUR	375.000.000
42	PT. HARINDO GAS UTAMA	500.000.000
43	PT. UNITED TRACTORS	-
44	PT. TRAKINDO UTAMA	10.000.000
45	PT. SINAR KASIH SOROWAKO	1.150.000.000
46	PT. BARUGA MANDIRI PRATAMA	252.000.000
47	CV. PAKALA KEMBAR JAYA	45.000.000
48	CV. AZ-ZAHRA (68111)	212.200.000
49	PT. BERLIAN NUHA PERSADA	255.000.000
50	CV. INDO MULIA KARYA	16.000.000
51	PT. ADHWA SELARAS ABADI	77.000.000

52	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	5.118.800.000
53	CV. TIGA LAKSANA	25.000.000
54	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY	1.525.000.000
55	PT. HADJI KALLA	75.958.834
56	CV. SARAMAI MANDIRI	130.000.000
57	PT. PONGKERU MUTIARA ABADI	410.000.000
58	PT. WAHANA MULTI NIAGA	805.400.000
59	PT. RISYANIPATRA MANDIRI	650.000.000
60	PT. BINTANG MANDIRI VERBEK	600.000.000
61	PT. ARTHAVEST PUTRA ANANTAMA	204.000.000
62	PT. HJ LA TUNRUNG COCOA PLANTATION	108.717.000
63	PT. MANDIRI PALMERA AGRINDO	28.473.310.999
64	PT TUNAS DWIPA MATRA	296.549.296
65	PT MOJONG MITRA MAJU	60.000.000
66	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	3.028.969.592
67	CV BATARA PERTALIINDO	72.250.000
68	PT SUMBER RAHMAT PERTIWI	192.907.217
69	PT NUSANTARA INDO PROPERTI PALOPO	680.000.000
70	PT CENTRAMATAMA MENARA INDONESIA	550.000.000
71	PT PRIMA UTAMA LESTARI	20.688.363.851
72	PT. DAYA INDAH YASA	194.444.444
73	PT. DAFFA SAPUTRA JAYA	800.000.000
74	PT ALE LUWU RAYA	2.000.000.000
75	PT.SURYA WARSA ABADI	-
76	PT. ANGKASA JASA MULIA	22.399.496
77	CV. TRIHAR UTAMA	-
78	PT. GERBANG HARAPAN MULTIERA	1.085.000.000
Total		1.144.862.849.675

Tabel. 16
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN
Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2022

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	30	416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021	41	-	41	567.486.903.997
2022	30		72	1.144.862.849.673

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021, Indikator nilai investasi PMDN terealisasi sebesar Rp. 567.486.903.997,- dengan Target sebesar Rp. 700.000.000.000,- maka terealisasi sebesar 81,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi

PMDN tahun 2022 yang diperoleh sebesar Rp. 1.144.862.849.673,- dengan Target sebesar Rp. 800.000.000.000,- maka tercapai sebesar 143,00%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator kinerja nilai investasi PMDN pada tahun 2021, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 81,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 143,00% maka terjadi kenaikan sebesar 62 point. Nilai Realisasi Investasi PMDN mengalami peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 disebabkan:

1. kesadaran dan tingkat kepatuhan PMDN dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semakin tinggi,
2. Adanya Penggunaan Aplikasi OSS (Online Single Submission) memberi kemudahan pelaku usaha dalam pendaftaran dan pengurusan perizinan berusaha.
3. Adanya Anggaran DAK Non Fisik pada Bidang Pengendalian pengawasan dan Pengaduan yang bertujuan untuk mengawasi, memantau dan membantu UKM dan Perusahaan dalam pelaporan LKPM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2026

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2021 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMDN untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMDN tahun 2022 sebesar Rp. 1.144.862.849.673,- dibandingkan dengan target akhir tahun, maka telah mencapai 114,40%.

- ❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah yaitu :

A. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Subkegiatan ini adalah kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi UKM dengan Bank dan pihak-pihak pemberi pinjaman dan kemudahan pemberian modal.

- b. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, subkegiatan ini adalah kegiatan penyediaan PERDA penanaman modal yang akan digunakan sebagai regulasi dalam kegiatan peningkatan investasi.
 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota
 - B. **Program Promosi Penanaman Modal** didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
 - a. Subkegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal yang indikatornya yaitu jumlah media promosi Penanaman Modal. Jumlah media yang digunakan adalah media surat kabar yang digunakan untuk meliput pemberitaan Penanaman Modal. Pada tahun 2022 terealisasi 3 media.
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota, indikator subkegiatan adalah jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan, kegiatan pameran terealisasi dan dilaksanakan antara lain Pameran APKASI di JCC Jakarta dan Pameran Dekranasda Di Makassar
 - C. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 Subkegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sumber Pendanaan Dana Transfer Khusus DAK non Fisik , yang terbagi menjadi 3 subkegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah pemantauan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tahun 2022 sebanyak 8 kali kegiatan dengan target kegiatan sebanyak 8 kali.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah Kegiatan pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tahun 2022 sebanyak 240 orang dan terealisasi 100%.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Pada Tahun 2022 target kinerja sebanyak 14 kali kegiatan dan terealisasi sebanyak 14 kali

kegiatan.

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Nilai Realisasi investasi, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk Pembuatan peta potensi dan Perda penanaman modal yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di DPMPTSP
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Pelaksanaan pengerjaan peta potensi dan PERDA Penanaman Modal sangat tergantung dari berbagai instansi, pihak legislative (DPRD) belum terlaksana karena keterlambatan PPTK dalam merespon kegiatan sesuai anggaran kas.
- Belum terbitnya Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal, hal ini disebabkan belum adanya nomor registrasi Peraturan daerah (Perda) dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Luwu Timur data yang disampaikan baru berdasarkan terhadap izin yang diterbitkan sehingga belum mencerminkan data investasi secara keseluruhan.
- Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan kepada pihak team TAPD dan Bappelitbangda untuk mengalokasikan dana yang lebih besar
- Meningkatkan pembinaan dan pemantauan kepada PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Luwu Timur, sehingga data investasi dan nilai investasi bisa lebih akurat.
- Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
- Melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMPSTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Penyesuaian dan perubahan anggaran pada sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal . Perubahan terjadi pada Belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi Investasi dan peluang usaha di Daerah maka dapat terfasilitasi dengan adanya Media Koran, website, aplikasi LKPM, dokumen Peta potensi.
- Sumber daya yang ada pada DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DPMPSTSP tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penyebaran informasi. Sumber daya manusia yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur sebanyak 42 orang yang terdiri dari 20 orang PNS, 22 orang Upah Jasa.

Tabel. 17
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisas	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	3,3 Triliun	4,092 Triliun	124%	188.444.480,-	185.519.500,-	98,45%
	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	35	35	100%	406.846.885,-	396.916.951,-	97,56%
	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal	72%	82,24%	114,24%	417.091.801,-	391.110.006,-	93,77%

1. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2022 dengan Tahun sebelumnya

Tabel. 18
Perbandingan Target dan Realisasi Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Nilai realisa investasi Daerah						Target Tahun 2021
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Realisasi Investasi	3,3 Triliun	4,092 T	124 %	3 Triliun	4,171 T	139 %	3 Triliun

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2021). Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran pelaku usaha (PMA/PMDN) dalam melaporkan realisasi kegiatannya dalam aplikasi LKPM, selain itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan jumlah investor dalam berusaha. Target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target dalam Renstra DPMPTSP 2021-2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai realisasi investasi setiap tahunnya.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan target jangka menengah pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Nilai realisasi investasi Daerah	4,092 Triliun	4,092 Triliun	4 Triliun	100%

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel . 20

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 DPMPTSP Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	a.	Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	%	72,00	82,24	114,22

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022

Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Rata-rata penyelesaian Perizinan} = \frac{\sum \text{izin yang terbit tepat waktu}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Jumlah total Berkas Masuk : izin
 Jumlah total izin terbit : 5.474 izin
 Jumlah izin terbit tepat waktu : 4.502 izin
 Rata-rata penyelesaian izin = (4.502 : 5.474) x 100
 = 82,24 %

Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif menyangkut dalam pembangunan. Olehnya itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang pedoman survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan public, pedoman itu dimaksudkan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPTSP dan diharapkan memberikan kepastian masyarakat dalam menilai secara objektif dan continue terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan public di DPMPTSP.

Target tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur sebesar 85,30 atau kategori "baik". Pada tahun 2022 dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan sebesar 87,80 atau mencapai 102,93 % dari target yang ditetapkan.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel. 21

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Intervar Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.26 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuesioner tersebut terdapat 9 unsur pelayanan. Jumlah SKM sampai dengan bulan Januari s.d Desember 2022 **sebanyak 354 lembar kuesioner**. Dengan menggunakan perhitungan rumus dan cara yang ditetapkan sesuai pedoman umum penyusunan SKM Nomor 16 tahun 2014, jumlah kategori tingkat pelayanan yang disesuaikan Survey Kepuasan Masyarakat 87,80 (Baik).

Tabel. 22**Nilai Unsur-Unsur Pelayanan**

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,494
U2	Prosedur Pelayanan	3,446
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	3,366
U4	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,989
U5	Standar Pelayanan	3,321
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,446
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,435
U8	Sarana dan Prasarana	3,420
U9	Prosedur Penanganan Pengaduan	3,690
NRR Unsur		= 31,607

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dihitung Nilai IKM Tahun 2022 sebagai berikut:

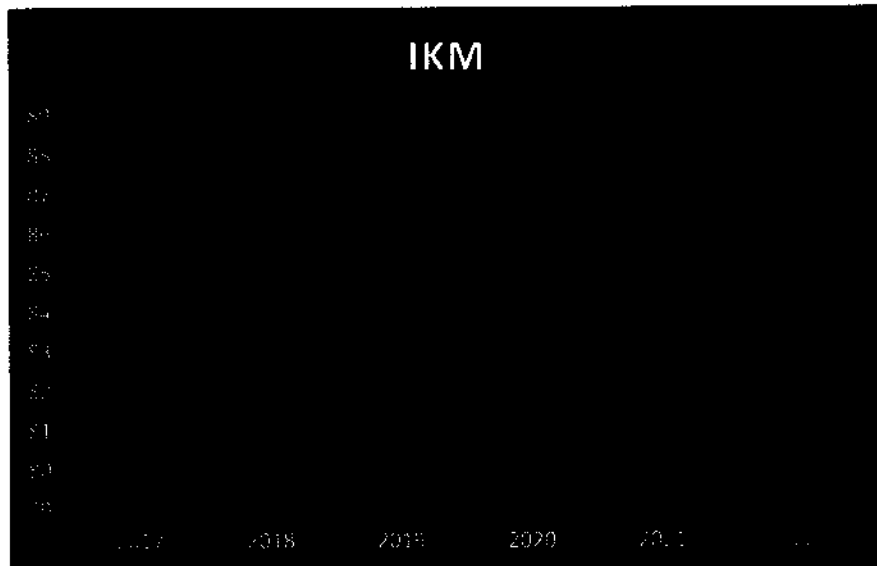
$$\begin{aligned}
 \text{NRR Tertimbang} &= \text{NRR Unsur} \times 0.111 \\
 &= 31,607 \times 0.111 \\
 &= 3.508
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{Total NRR Tertimbang} \times 25 \\
 &= 3,508 \times 25 \\
 &= \mathbf{87,70}
 \end{aligned}$$

Tabel. 23**Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2020 - 2022**

CAPAIAN IKM	TARGET	REALISASI	(CAPAIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2020	85,01	85,51	100,59
Tahun 2021	85,01	85,37	100,42
Tahun 2022	85,20	87,80	103,05

Diagram. 4
 Persentase Capaian IKM DPMTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2022



Terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah Sangat Baik, dan **kepuasan masyarakat tertinggi** adalah dalam unsur ***Kewajaran Biaya Pelayanan***, karena Pemerintah sudah menggratiskan semua biaya pengurusan perizinan kecuali pada biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

IKM pada Tahun 2022 lebih tinggi dari pada Tahun 2021 disebabkan karena telah dilakukan tindak lanjut dan perbaikan ditahun 2022 atas hasil SKM Tahun 2021.

Kegiatan 1. Pelayanan Perizinan

Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan di dalam melakukan kegiatan usaha, maka pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas DPMTSP Kab. Luwu Timur.

Merujuk pada regulasi tersebut diatas, penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan merupakan penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dan non perizinan, dari 142 jenis menjadi 34 jenis perizinan dan non perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Wujud kinerja dapat dilihat dalam bentuk meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan. Kecepatan pelayanan perizinan dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah izin yang diterbitkan. Semakin tinggi persentase jumlah izin yang diterbitkan, maka kinerja DPMPTSP semakin meningkat.

Persentase jumlah izin yang diterbitkan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan} = \frac{\sum \text{izin yang diterbitkan}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, persentase jumlah izin yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh berkas yang masuk 5.474 berkas
- b. Jumlah izin yang diterbitkan 5.474 izin
- c. Persentase jumlah izin yang diterbitkan 100%

Tabel. 24
Persentase surat izin yang diterbitkan Tahun 2017 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	-	1.919	-
2018	2.400	2.947	122,79
2019	2.500	2.826	113,04
2020	4.000	4.376	109,40
2021	4.000	4.748	118,70
2022	4.100	5.474	133,51

Nilai realisasi Izin mencapai 133,51% disebabkan :

1. Adanya kemudahan Perizinan berbasis elektronik, sehingga pendaftaran bias dilakukan oleh masyarakat umum atau pelaku usaha dimana saja dan kapan saja,
2. Tersedianya sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan perizinan,
3. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan,
4. Adanya Program Pusat yang menargetkan 1 Juta UKM secara Nasional dan 1000 UKM per Kabupaten, sehingga Pelaku usaha/ UKM lebih terpacu dan sadar dalam pengurusan dan pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan.

Diagram. 5
Persentase Capaian Realisasi Izin yang diterbitkan
DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2022



Kegiatan 2. Persentase Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Salah satu factor penting dalam penyelenggaraan Publik adalah pengaduan masyarakat. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan publik berkewajiban membentuk mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi serta pengawasan internal dari seluruh bagian organisasi untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan Publik.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Timur meliputi tata cara sebagai berikut:

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan yang datang langsung melalui petugas loket secara lisan/telepon dan secara tertulis (form pengaduan), SMS centre;

2. Pengaduan tidak langsung, yaitu pengaduan tertulis disampaikan melalui kotak saran/masukan.

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pelaksanaan izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur. Pada tahun 2022 ada 5 target pengaduan dan terealisasi sebanyak 6 pengaduan dan semuanya dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti dalam penyelesaiannya.

Tabel. 25
Rekap Laporan Pengaduan Tahun 2022

N O.	TANGGAL	NAMA/ ALAMAT/ NO.HP	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	01/09/2022	NITA / MALILI/ 085342220017	Konsultasi terkait rencana pemindahan lokasi perusahaan dari makassar ke malili	terkait pemindahan lokasi perusahaan langkah awalnya adalah merubah alamat di akta notaris, setelah itu baru bisa dilakukan perubahan di OSS	
2	30/09/2022	MARGONO/ MALILI / 081241293402	- Konsultasi terkait keberadaan dan perizinan Tambang Gallan C yang terletak di Jl. H. Abdulah, Kelurahan Malili. - Kelurahan Malili. Sekaligus mempertanyakan terkait langkah-langkah yang bisa diambil Pihak Kelurahan terhadap komplain masyarakat sekitar terkait debu yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut.	-dijelaskan bahwa untuk Perizinan Tambang Gallan C, tidak lagi menjadi kewenangan daerah, namun menjadi kewenangan Kementerian ESDM yang telah didelegasikan ke Pemerintah Provinsi. - Pihak Kelurahan dapat menyampaikan kepada pihak penambang agar melakukan penyiraman ke jalan yang dilewati oleh kendaraan pengangkut material tambang. Namun bila tidak dilaksanakan, dapat diadukan ke DLH	
3	31/10/2022	ASRIN (PT. SINAR NONONGAN)/ 082259702006	Konsultasi tentang waktu penyelesaian sertifikat standar IUJK	bahwa untuk segala perizinan di OSS telah memiliki waktu standar untuk penyelesaiannya yaitu 15 hari, namun untuk IUJK tidak dapat kami pantau dan berkoordinasi dengan tim teknis karena kewenangannya ada di Kementerian.	
4	11/10/2022	I PUTU (PT. ARCORA HIDRO JAKARTA)/ JAKARTA/ 085248681927	konsultasi terhdapa persizinan lingkungan PLTH Kalaena karena akan melakukan perubahan nama perusahaan.	terkait izin lingkungan disarankan untuk membuat izin lingkungan baru, karena izin lingkungan saat ini menggunakan nama perusahaan yang lama. Dan berkoordinasi lebih lanjut ke DLH	

5	31/10/2022	NIRWAN/ LSM LIRA /082320631432	Mempertanyakan legalitas perizinan PT. Bumi Batara	mengenai hal tersebut belum masuk ke dalam ranah kewenangan DPMPTSP karena permohonan perizinannya masih dalam tahap proses di Tim Teknis Dinas PUPR.	
6	05/12/2022	PERDI/ TOMONI / 085298799656	Konsultasi tentang tata cara pengurusan perizinan pendirian SPBE dengan menggunakan perusahaan berdomisili di Papua	telah dijelaskan langkah-langkah bahwa bisa saja menggunakan perusahaan dari Papua dan menambahkan saja lokasi kegiatan baru pada aplikasi OSS	

Sasaran Pendukung

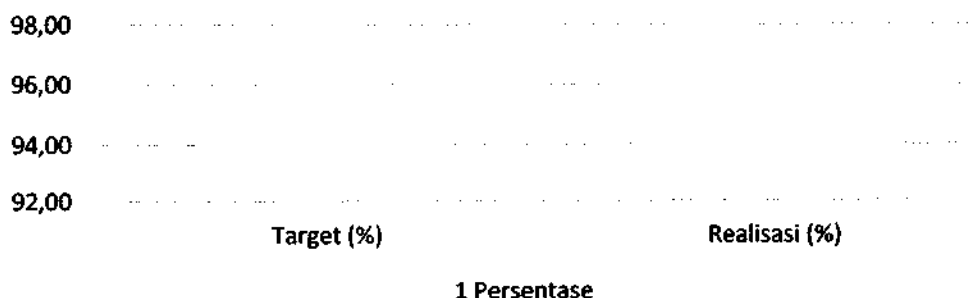
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan PTSP

Tabel. 26
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

SASARAN 3:	Persentase capaian kinerja program Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (%)	95,00	97,63	102,76
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan PTSP				

Grafik.
Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2022

Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"



Tabel. 27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian (%)	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	97,63%	102,76%	○

Keterangan : ○ Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Realisasi Indikator sasaran, yaitu nilai LAKIP Tahun 2022 masih belum terealisasi, karena belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten. Pada indikator ini ada 1 (satu) program yang didukung dengan 9 (sembilan) kegiatan, seperti diuraikan pada Tabel 28.

PROGRAM/ KEGIATAN						SUB KEGIATAN						KET		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI	% CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	%	TW I	25	21,34	85,36								
			TW II	25	20,00	80,00								
			TW III	25	21,00	84,00								
			TW IV	25	25,00	100,00								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	%	TW I	25	25,00	100,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	25,00	100,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25	25,00	100,00				TW IV	1	1	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	TW I	25	25,00	100,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Dok	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	25	100,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25	25	100,00				TW IV	1	1	100,00	
							Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai	Org	TW I	5	5	100,00	

LAKIP 2022

							Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		TW II	2	3	100,00	
										TW III	3	3	100,00	
										TW IV	1	5	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	TW I	25	25,00	100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	TW I	3	3	100,00	
			TW II	25	22,00	88,00				TW II	3	3	100,00	
			TW III	25	23	92,00				TW III	5	5	100,00	
			TW IV	25						TW IV	5	5	100,00	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	TW I	2	2	100,00	
										TW II	2	2	100,00	
										TW III	2	2	100,00	
										TW IV	2	2	100,00	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	TW I	4	4	100,00	
										TW II	4	4	100,00	
										TW III	4	4	100,00	

										TW IV	4	4	100,00	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar	TW I	15	15	100,00	
										TW II	15	15	100,00	
										TW III	15	15	100,00	
										TW IV	15	15	100,00	
							Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Org	TW I	30	30	100,00	
										TW II	30	15	50,00	
										TW III	30	15	50,00	
										TW IV	30	70	233,33	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	TW I	60	212	353,33	
										TW II	80	58	64,44	
										TW III	80	78	97,50	
										TW IV	44	76	172,73	
Pengadaan Barang Milik	Jumlah barang milik	Unit	TW I	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah peralatan/	Unit	TW I	0	0	0,00	Dihapuskan pada

LAKIP 2022

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		TW II	100	0	0,00	Mesin Lainnya	mesin lainnya yang diadakan		TW II	2	0	0,00	perubahan
			TW III	0	0	0,00				TW III	0	0	0,00	
			TW IV	0						TW IV	0	0	0,00	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0,00	Dihapuskan pada perubahan
										TW II	2	0	0,00	
										TW III	0	0	0,00	
										TW IV	0	0	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	TW I	25	38	152	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan	Surat	TW I	100	260	260,00	
			TW II	25	24	96				TW II	200	190	95,00	
			TW III	25	20,16	80,64				TW III	400	156	39,00	
			TW IV	25						TW IV	200	198	99,00	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	Rek	TW I	15	15	100,00	
										TW II	15	15	100,00	
										TW III	15	15	100,00	

										TW IV	15	15	100,00	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	Org	TW I	4	4	100,00	
										TW II	4	4	100,00	
										TW III	4	4	100,00	
										TW IV	4	4	100,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	TW I	23	8	34,78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan . Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	TW I	9	3	33,33	
			TW II	25	20	80,00				TW II	9	6	66,67	
			TW III	25	19,75	79,00				TW III	9	7	78	
			TW IV	16						TW IV	9	9	100	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	TW I	5	5	100,00	
										TW II	10	10	100,00	
										TW III	20	16	80,00	
										TW IV	12	12	100,00	
							Pemeliharaan / Rehabilitasi	Jumlah gedung	Unit	TW I	0	0	0,00	

LAKIP 2017

							Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kantor yang dipelihara		TW II	1	1	100,00	
										TW III	0	0	0,00	
										TW IV	0	0	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	TW I	25	24	96,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Org	TW I	21	20	95,24	
			TW II	25	24	96,00				TW II	21	20	95,24	
			TW III	25	24,4	97,60				TW III	21	20	95,24	
			TW IV	25						TW IV	21	20	95,24	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	3	3	100,00	
										TW II	4	4	100,00	
										TW III	5	5	100	
										TW IV	6	6	100	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	Rp	TW I	-	4.610.660	0,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat	Dok	TW I	1	1	100,00	
			TW II	625.000.000	31.197.102	4,99				TW II	1	1	100,00	

			TW III	875.000.000	248.570.000	28,41		waktu		TW III	1	1	100	
			TW IV	#####	###					TW IV	1	1	100	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	2	6	300,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100	
			TW II	5	5	100,00				TW II	1	1	100	
			TW III	7	7	100,00				TW III	1	1	100	
			TW IV	3						TW IV	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	0	0	0	
										TW II	1	1	100	
										TW III	1	1	100	
										TW IV	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	0	
										TW II	0	0	0	
										TW III	1	1	100	

LAKIP

									TW IV	0	0	0	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100	
									TW II	2	2	100	
									TW III	4	4	100	
									TW IV	3	3	100	

1. Perbandingan Target Tahun 2022 dan Realisasi Tahun 2022

➤ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus”**.

Target Indikator sasaran penunjang pada TA. 2022 adalah 95% dan realisasi 97,63% dengan persentase capaian kinerja 102,76%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIMDA NG untuk penatausahaan keuangan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Keterlambatan penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Adanya sistem belanja barang makan minum dan Alat tulis kantor menggunakan belanja e-katalog di ULP.
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Untuk segera melakukan penatausahaan keuangan bilamana aplikasi telah siap digunakan
- Untuk segera menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPMTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

➤ Efisiensi Sumber Daya

- Tidak adanya tenaga ASN pada jabatan pelaksana yang dapat membantu pejabat struktural sehingga untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	97,63%	102,76%	3.389.606.008,-	3.335.993.550,-	98,42%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	97,63%	102,76%	3.389.606.008,-	3.335.993.550,-	98,42%

Tabel. 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102,76%	98,42%	1,58%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 102,76% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,42%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 1,58%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2022 dengan Tahun sebelumnya (2021)

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 31
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						Target Tahun 2022
Indikator Kinerja Sasaran	TA. 2022			TA. 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	97,63 %	102,76 %	95 %	89,19 %	93,88 %	100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan TA. 2021 yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Capaian kinerja beberapa sub kegiatan melebihi dari target yang direncanakan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 32
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan IV Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,63%	97,63%	95%	102,76%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 33
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2022	Target TW 1V	Realisasi TW 1V	Capaian
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan	95%	95%	97,63%	102,76%

			sesuai standar				
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	87,50%	87,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	21 Org	21 Org	20 Org	95%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	6 Dok	6 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	1 Dok	1 Dok	100%

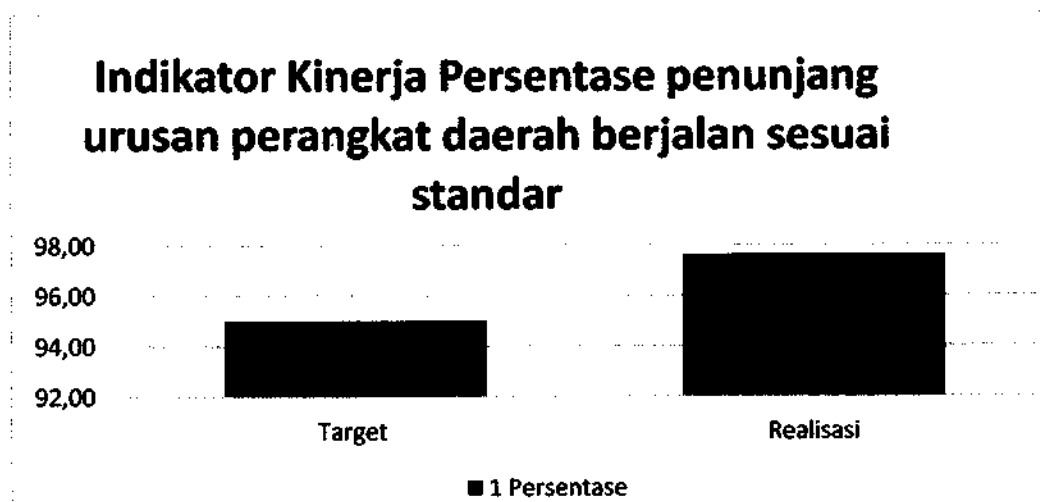
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	133,33 %	133,33%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13 Org	3 Org	5 Org	166,66%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	95,00%	95,00%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	15 Expl	15 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	120 Org	30 Org	70 Org	233%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	500 Kali	44 Kali	76 Kali	172,7%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	0%	0%	0%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%

		kebutuhan kantor	diadakan				
b.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	94,72%	94,72%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	900 Surat	200 Surat	198 Surat	99%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	60 Rek	15 Rek	15 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	4 Org	4 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	90%	90%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	8 Unit	90%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (outcome)

Grafik.
Perbandingan Target dan realisasi Triwulan IV TA. 2022



Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 95% dan realisasi 97,63% dengan capaian kinerja 102,76%, dan menyerap anggaran sebesar 97,96%. Capaian kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 96,4% dengan persentase capaian kinerja 95%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 90%, yang diakibatkan adanya jabatan Pelaksana (Pejabat Pemeriksa Keuangan) yang belum terisi. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 21 org dan realisasi 20 org dengan persentase capaian kinerja 95 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan staf pelaksana (Pejabat Pemeriksa keuangan) yang belum terisi. Disediakan anggaran kas pada triwulan IV sebesar Rp 2.434.895.003 dan realisasi Rp 2.406.374.091 atau sebesar 98,82%. Terdapat sisa anggaran pada triwulan IV karena bersifat persediaan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target pada TA. 2022 sebanyak 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen (100%) yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022 1 dok, Laporan Triwulanan 1 dok, Laporan Bulanan Bendahara 3 dok. Disediakan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp 103.154.435 terealisasi sebesar Rp 101.647.500 atau sebesar 98,54%.

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target pada TA. 2022 sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD. Disediakan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp 10.623.710, terealisasi sebesar Rp. 10.612.000 atau sebesar 99,89%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan *Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus*. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target pada triwulan 2 TA. 2022 sebanyak 3 org dan realisasi 5 orang (133,33%) yaitu Bimtek anggaran 1 orang, Bimtek LKPJ/LPPD 1 orang, Bimtek Arsip 3 orang. Penggunaan anggaran BIMTEK disesuaikan undangan pemanggilan peserta. Disediakan anggaran sebesar Rp 56.100.000, Realisasi keuangan sebesar Rp 54.905.000,- atau sebesar 97,87%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan *Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus*. Target 100% dan realisasi 94,00% dengan persentase capaian kinerja 98,00%. Capaian kinerja kurang dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi. Dan disediakan anggaran sebesar Rp Rp 438.017.950,- terealisasi sebesar Rp 437.690.305,- atau sebesar 99,93%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan *Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus*. Dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan dilakukan pada Triwulan II dan III TA. 2022. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan dilakukan pada Triwulan III TA. 2022.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan *Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus*. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target TA. 2022 sebanyak 900 surat dan terealisasi 804 surat dengan persentase capaian kinerja 89,33%.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target pada TA. 2022 sebanyak 60 rekening dan realisasi 12 rekening, terdiri dari Listrik DPMPSTSP 12 rek, rek Air kantor 12 rek, kartu halo 12 rek, TV Kabel 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100%.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 4 orang setiap triwulan dan realisasi 4 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan tenaga security.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

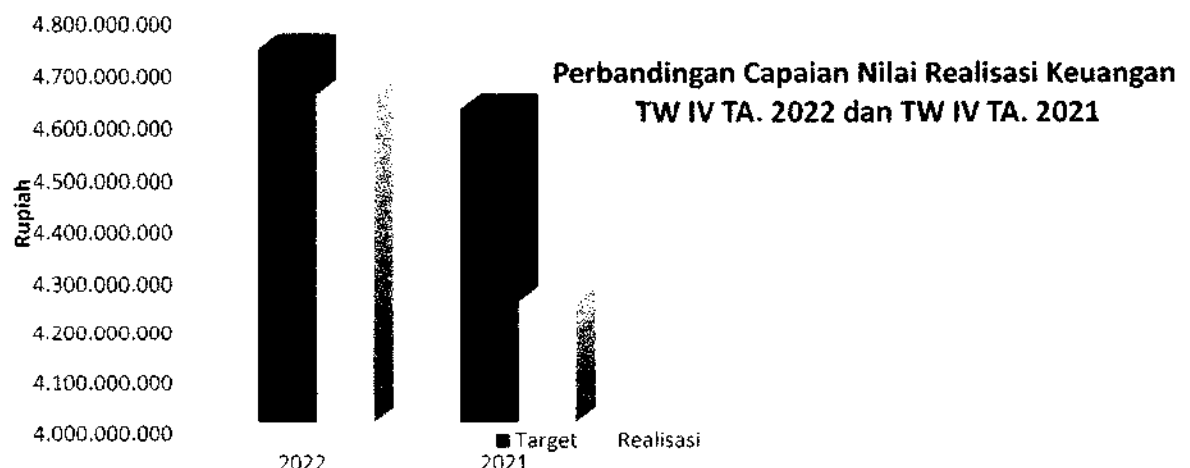
Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus*. Target 100% dan realisasi 91,03% dengan persentase capaian kinerja 91,03%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp. **4.739.180.131,-** (*Empat Milyar Tujuh ratus tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai Rp **2.474.135.003,-** belanja barang dan jasa Rp. **2.255.045.128,-** dan belanja modal Rp **10.000.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program, 9 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Triwulan 4 Tahun Anggaran 2022 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 30. Perbandingan Realisasi Anggaran TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021



Tabel. 34
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

REALISASI KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 2 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Desember 2022	SELISIH
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.389.606.008,00	3.389.606.008,00	3.335.993.550,00	98,42
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.244.735,00	77.244.735,00	76.678.304,00	99,27
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.698.010,00	41.698.010,00	41.600.000,00	99,76
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	3.414.860,00	3.284.750,00	96,19
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.965,00	4.162.965,00	3.944.554,00	94,75
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	27.968.900,00	27.849.000,00	99,57
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.049.438,00	2.538.049.438,00	2.508.021.591,00	98,82
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.434.895.003,00	2.434.895.003,00	2.406.374.091,00	98,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	103.154.435,00	103.154.435,00	101.647.500,00	98,54
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	16.781.981,00	14.720.000,00	87,71
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	16.781.981,00	14.720.000,00	87,71
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	10.623.710,00	10.612.000,00	99,89
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	10.623.710,00	10.612.000,00	99,89
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.085.956,00	69.085.956,00	67.794.700,00	98,13
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	12.985.956,00	12.889.700,00	99,26

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	56.100.000,00	56.100.000,00	54.905.000,00	97,87
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.017.950,00	438.017.950,00	437.690.305,00	99,93
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	5.832.250,00	5.831.000,00	99,98
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	7.710.700,00	7.686.000,00	99,68
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	13.675.000,00	13.674.000,00	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	100,00
07	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.080.000,00	395.080.000,00	394.779.305,00	99,92
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	6.982.000,00	99,74
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	6.982.000,00	99,74
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	152.889.438,00	137.530.780,00	89,95
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	22.879.570,00	22.421.730,00	98,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	58.009.868,00	43.109.050,00	74,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	79.912.800,00	75.963.870,00	95,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	45.650.000,00	43.235.870,00	94,71
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	21.150.000,00	19.620.000,00	92,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	13.112.800,00	13.108.000,00	99,96
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	406.846.885,00	406.846.885,00	396.916.951,00	97,56

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	235.311.845,00	235.311.845,00	235.128.551,00	99,92
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	189.303.030,00	189.303.030,00	189.247.800,00	99,97
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	46.008.815,00	46.008.815,00	45.880.751,00	99,72
	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	161.788.400,00	94,32
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	161.788.400,00	94,32
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	188.444.480,00	185.519.500,00	98,45
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	188.444.480,00	185.519.500,00	98,45
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	22.638.490,00	21.507.500,00	95,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	165.805.990,00	164.012.000,00	98,92
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	307.191.107,00	303.816.180,00	98,90
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	307.191.107,00	303.816.180,00	98,90
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	286.870.777,00	284.608.100,00	99,21
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	20.320.330,00	19.208.080,00	94,53
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	417.091.801,00	391.110.006,00	93,77
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	417.091.801,00	391.110.006,00	93,77
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	102.921.550,00	92.754.000,00	90,12
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	215.381.761,00	215.381.761,00	199.665.606,00	92,70
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	98.788.490,00	98.690.400,00	99,90

F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	29.999.850,00	29.266.337,00	97,55
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	29.999.850,00	29.266.337,00	97,55
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	29.999.850,00	29.266.337,00	97,55
TOTAL BELANJA		4.739.180.131,00	4.739.180.131,00	4.642.622.524,00	97,96

Tabel. 35

❖ Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran

No		PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1		3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % target triwulan II, 25 % realisasi triwulan III 25 %, realisasi triwulan IV 25 %	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.77.244.735, realisasi Rp. 76.678.304 sisa anggaran Rp.566.431.	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tercapai 3 dokumen	dari target keuangan Rp 41.698.010 terrealisasi Rp 41. 600.000,- atau sebesar 99,76%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapai 2 dokumen	dari target keuangan Rp 3.414.860 terrealisasi Rp 3.284.860,- atau sebesar 96,19%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tercapai 2 dokumen	Dari target keuangan Rp 4.162.965 terrealisasi Rp 3.944.554,- atau sebesar 94,75%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai 10 dokumen	Dari target keuangan Rp 27.968.900 terrealisasi Rp 27.849.000,- atau sebesar 99,57%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indikator Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.2.538.049.438 realisasi Rp. 2.508.021.591 (98,82%) sisa anggaran Rp. 30.027.847 .	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan terbayarkan target kinerja 21 orang target triwulan IV 21 orang realisasi 20 Orang	sisa anggaran bersifat persediaan.	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tercapai 18 dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator Persentase administrasi milik Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai target	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.16.781.981 realisasi Rp. 14.720.000 (87,712%) sisa anggaran Rp. 2.061.981 .	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capai target		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capai target		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	indikator Persentase administrasi milik Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai target	Anggaran yang diminta pada triwulan I - III sebesar Rp.68.185.956,- realisasi 38.355.000 sisa anggaran kas 29.830.956 dari sisa anggaran sub kegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp.4.640.000,- dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 33.715.000,-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capai Target dan berdasarkan Kebutuhan pegawai	terrealisasi 99,26%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis bagi ASN TW1: tercapai 5 orang (Milda, Iksan, Ayub Kombong, Idris, Joni), TW2: tercapai 3 orang (Idris, Hariyadi, Fahmi), TW3: tercapai 3 orang (Fahmi, Andi Rajuni, Amiruddin); TW4: tercapai 5 orang (Andi Habil, Joni, Nerty, Ichsan, Ondo ira)	terrealisasi 97,87%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capai Target	terrealisasi 99,98%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan dihapuskan karena adanya pengurangan anggaran pada perubahan 2022	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Direalisasikan pada Tw.3	Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.000.000 dan terrealisasi Rp 3.000.000,- (100%)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capai Target	terrealisasi 99,68%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capai Target	terrealisasi 99,99%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capai Target	terrealisasi 100%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capai Target	terrealisasi 100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capai Target	terrealisasi 99,92%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan dihapuskan karena adanya pengurangan anggaran pada perubahan 2022	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan pada Triwulan II sesuai target anggaran kas dan rencana aksi	Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 6.982.000 atau sebesar 99,74%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	capai target	terrealisasi 74,31%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	capai target	terrealisasi 100%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capai Target		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capai Target		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capai Target , sudah direalisasikan pada TW.2		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional target 33 perusahaan tercapai 30 perusahaan atau sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi baik Perda/Perbup terkait pemberian insentif investasi, sehingga berdampak pada kurangnya minat investasi Perusahaan-perusahaan.	teralisasi 97,56 %	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator kegiatan pada Tw.4 tercapai sebesar 25% dengan target 25% atau teralisasi sebesar 100%		
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tercapai 2 Perda	teralisasi 99,97%	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tercapai 2 kegiatan	teralisasi 99,72%	
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	tercapai	teralisasi 94,32 %	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	tercapai 1 peta potensi	teralisasi 94,32 % (karena ada sisa penawaran dari pihak ke3)	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi belum terkumpul secara total karena adanya kendala pada aplikasi LKPM dari Pusat	teralisasi 98,45%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Target MoU pada Tw.3 sebesar 2, tetapi sudah tercapai pada Tw.2 sebanyak 5 MoU atau sebesar 100%	teralisasi 98,45%	
01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	capai target	Terealisasi 95%	
02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	capai target	Terealisasi 98,92%	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Target Kinerja berupa persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP sebesar 72% dan teralisasi sebesar 75,91%. Karena izin yang terbit sesuai SOP sebanyak 1.270 izin dan total izin yang terbit sebanyak 1.673 izin		

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99,84% dari target 100%.		
01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Total izin terbit sampai Tw.4 tercapai 5.474 izin dari total target izin sebanyak 4.100 izin atau tercapai sebesar 133,51% , dan izin terbit sesuai kepemilikan izin perempuan sebanyak 2.635 izin	realisasi 98,90%	
02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Target Pegaduan sebanyak 5 pengaduan dan tercapai 6 pengaduan atau sebesar 120%	realisasi 94,53%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Anggaran yang diminta untuk triwulan I - III Rp. 378.248.141,- realisasi Rp.218.403.400 capaian 59,70% sisa anggaran kas Rp 159.844.741,-	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang taat melaporkan LKPM sebanyak 20%		
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	Realisasi 90,12%. Belanja Sewa bangunan sifatnya di siapkan karena ada kegiatan yang pelaksanaannya di gabung. Sewa bangunan sifatnya disiapkan karena ada kegiatan.	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	realisasi anggaran sebesar 92,70%. Belanja Sewa bangunan sifatnya di siapkan karena ada kegiatan yang pelaksanaannya di gabung.	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	realisasi 99,90%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	capai Target		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	capai target	realisasi 97,55%	

LAKIP 2022

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Unsur/ Bidang/ Unsur/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Keterangan
					I		II		III		IV		10		11		
					5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai Standar	100	3.389.606.008	512.314,99	418.308.534										
	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17	77.244.735	3	5.195.000	4	21.600.000	4	15.174.000	4	34.709.304	17	76.678.304	100,00% 99,27%	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan yang	3	41.698.010	1	4.395.000	1	13.815.000	1	5.110.000	1	15.280.000	3	41.600.000	100,00% 99,76%	

		Daerah	disusun tepat waktu															
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.414.860	-	-	1	-	1.000.000	1	2.264.750	2	3.284.750	100,00%	96,19%		
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	4.162.965	1	800.000	-	-	1.000.000	1	2.144.554	2	3.944.554	100,00%	94,75%		
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	27.968.900	1	-	2	7.785.000	8.064.000	5	12.000.000	10	27.849.000	100,00%	99,57%		
					77.244.735	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100,00%	99,27%		
						Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	2.538.049.438	21,50	284.619.793	22,04	857.531.842	22,00	704.214.927	23,56	661.655.029	97	2.508.021.591	97,44%	98,82%	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	21	2.434.895.003	20	273.819.793	20	836.441.842	20	672.356.927	20	624.755.529	20	2.406.374.091	95,24%	98,83%	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan perangkat	18	103.354.435	3	10.800.000	4	22.090.000	4	31.858.000	7	36.899.500	18	101.847.500	100,00%	98,54%	

LAKIP 2022

		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	daerah yang disusun tepat waktu																	
					2.538.049.438	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												95,43 %	98,82 %	
						Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	16.781.981	25	-	25	3.750.000	25	3.250.000	25	7.720.000	100	14.720.000	100,0 %	87,71 %				
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	16.781.981	1	0,00	1	3.750.000	1	3.250.000	1	7.720.000	4	14.720.000	100,00 %	87,71 %				
				16.781.981	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00 %	87,71 %		
					Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi		
2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	2.500.000.000	10.623.710	4.610.660	-	31.197.102	3.850.000	248.570.000	3.392.000	371.813.382	3.370.000	656.191.144	10.612.000	26,25 %	99,89 %				
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4	10.623.710	1	-	1	3.850.000	1	3.392.000	1	3.370.000	4	10.612.000	100,00 %	99,89 %				

[illegible]

LAKIP 2017

				69.085.955											0%	%	
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	438.017.950	55,65	82.670.900	23,43	52.949.200	24,48	101.421.912	31,17	197.648.293	130,96	437.890.305	130,96%	98,93%	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	5.832.250	3	-	3	-	2	2.153.000	7	3.678.000	15	5.831.000	100,00%	99,98%	
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan	1	3.000.000	-	-	-	-	1	3.000.000	-	-	1	3.000.000	100,00%	100,00%	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	7.710.700	2	1.512.000	2	314.000	2	1.595.000	2	4.264.000	2	7.686.000	100,00%	99,68%	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	13.675.000	4	2.250.000	4	1.200.000	4	6.750.000	4	3.474.000	4	13.674.000	100,00%	99,89%	

06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	6.720.000	15	-	15	2.900.000	15	1.280.000	15	2.540.000	60	6.720.000	100,00%	100,00%	
08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	120	6.000.000	30	2.500.000	30	-	15	1.000.000	45	2.500.000	120	6.000.000	100,00%	100,00%	
09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	500	395.080.000	212	76.408.900	58	48.535.200	78	88.642.912	76	181.192.293	424	394.779.305	84,80%	99,92%	
				438.017.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85,61%	99,93%	
					Prediksi Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi	
2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	3	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.982.000	0,00%	99,74%	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	1	7.000.000	-	-	-	-	1	6.982.000	-	-	1	6.982.000	100,00%	99,74%	

22

79

		Unsuran Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara															
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	45.650.000	5	5.600.000	6	6.015.000	7	9.220.600	8	22.400.270	7	43.235.870	75,00 %	94,71 %	
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47	21.150.000	5	1.620.000	10	650.000	16	10.480.000	12	6.870.000	43	19.620.000	91,49 %	92,77 %	
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1,00	13.112.800	-	-	1	13.108.000	-	-	-	-	1	13.108.000	100,00 %	99,96 %	
					79.912.800											83,47 %	95,06 %	
																	Sangat Tinggi	
	1.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	33	406.846.885	9	10.650.000	7	144.848.251	9	60.864.000		180.554.699	25	396.916.950	76,03 %	97,56 %	

LAKIP 2021

2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMO N yang terfasilitas	100	235.311.845	25	10.650.000	25	136.898.251	25	60.864.000	25	26.716.299	100	235.129.550	100,00%	99,92%
01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2	189.303.030	-	0,00	-	122.941.400	-	48.814.000	2	17.492.400	2	189.247.800	100,00%	99,97%
02	Evaluasi pelaksanaan fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2	46.008.815	1	10.650.000,00	1	13.956.851	-	12.050.000	-	9.223.899	2	45.880.750	100,00%	99,72%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang di susun dalam peta potensi Kabupaten	100	171.535.040	-	-	-	7.950.000	-	-	100	153.838.400	100	161.788.400	100,00%	94,32%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/	1	171.535.040	-	-	-	7.950.000	-	-	1	153.838.400	1	161.788.400	100,00%	94,32%

			Kota																
					406.846.885	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,56%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,3E+12	188.444.480	772.993.734.631	-	846.221.100.408	25.262.000	874.274.038.189	93.955.228	649.483.448.694	66.302.272	3.142.072.321.922	185.519.500	95,21%	96,45%			
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanaman Modal yang dihabiskan	5	188.444.480	2,00	-	2,00	25.262.000	1,00	93.955.228	-	66.302.272	5,00	185.519.500	100,00%	96,45%			
01	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Jumlah Media Strategi Penanaman Modal yang dibuat	3	22.638.490	1,00	-	1	6.620.000	1	6.462.500	-	8.425.000	3,00	21.507.500	100,00%	95,00%			
02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan	2	165.805.990	1,00	-	1	18.542.000	-	87.492.728	-	57.877.272	2,00	164.012.000	100,00%	98,92%			
				188.444.480	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,45%			
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang	72,00	307.191.167	15	38.744.409	20	116.905.680	22	58.903.700	-	-	57	303.816.180	79,17%	98,90%			

LAKIP 2022

		diterbitkan sesuai SOP															
2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100,00	307.191.107	25	38.744.400	25	116.905.680	25	58.903.700	25	89.262.400	100	303.815.180	100,00%	98,90%	
01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	4100,00	266.870.777	1.116	38.744.400	912	110.057.600	1.617	57.213.700	1.829	78.592.400	5.474	284.608.100	133,51%	99,21%	
		Jumlah Pemilik usaha (perempuan) yang diterbitkan izannya	1250,00		333	-	486	-	688		1.123		2.630				
02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut	5	20.320.330	1	-	1	6.848.080	2	1.690.000	2	10.670.000	6	19.208.080	120,00%	94,53%	

[illegible]

LAKIP 2020

		Pelaksanaan Penanaman Modal													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,0 0%	93,77 %	
				417.091.801											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
1.02	.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100	29.999.850	-						100	29.266.337	100,0 0%	97,55 %			
2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan	100	29.999.850	-	-	50	2.950.337	-	22.230.000	50	4.066.000	100 29.266.337	100,0 0%	97,55 %		
01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data yang disediakan	2	29.999.850	-	-	1	2.950.337	-	22.230.000	1	4.066.000	2 29.266.337	100,0 0%	97,55 %		
				29.999.850											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,0 0%	97,55 %	
															Predikat Kinerja	Sangat	Sangat	

								Tinggi	Tinggi	
				4.739.180.131,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			97,6 3%	97,9 6%	
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			San gat Ting gi	San gat Ting gi	

BAB IV

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.642.622.524,- (97,96%)
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar **97,63%**.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar **102,67%**.
- d. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :
 - Perjanjian Kinerja telah dimonitor pencapaiannya melalui Evaluasi Rencana Aksi Triwulan
 - Capaian kinerja outcome dan output telah disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 (Perbandingan capaian kinerja Triwulan 4 Tahun sebelumnya).
- e. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2022 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
 - Penyesuaian penggunaan Aplikasi SIMDA NG pada Penatausahaan Keuangan yang mempengaruhi penyerapan anggaran
 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
 - Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
 - Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

- Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan KAK dan anggaran kas yang telah disusun
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
- f. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati program/kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA diakhir tahun

Akhirnya dengan disusunnya LAKIPTahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi DPMPSTSP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE

NIP. 19641231 198703 1 208

Pangkat : Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

REKAPITULASI PENDAFTARAN DAN PENERBITAN IZIN TAHUN 2022

NO	IZIN	TRIWULAN I						TRIWULAN II						TRIWULAN III						TRIWULAN IV					
		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU					
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	PRASARANA KESEHATAN (APOTEK, TOKO OBAT)	4	1	25,00%	3	75,00%	6	0	0,00%	6	100,00%	12	5	41,67%	7	58,33%	7	2	28,57%	5	71,43%				
2	PRASARANA OPERASIONAL KESEHATAN (RUMAH SAKIT)	2	2	100,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%	2	1	50,00%	1	50,00%	1	0	0,00%	1	0,00%				
3	TENAGA KESEHATAN	174	71	40,80%	103	59,20%	398	24	6,03%	374	93,97%	418	23	5,50%	395	94,50%	265	231	87,17%	34	12,83%				
4	SPPL	0	0	0,00%	0	0,00%	180	180	100,00%	0	0,00%	422	422	100,00%	0	0,00%	265	265	100,00%	0	0,00%				
5	PKKPR PERIZINAN (PKKPR DARAT OSS)	0	0	0,00%	0	0,00%	35	35	100,00%	0	0,00%	34	34	100,00%	0	0,00%	35	35	100,00%	0	0,00%				
6	PKKPR NON PERIZINAN (MANUAL)	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	16	16	100,00%	0	0,00%	2	2	100,00%	0	0,00%				
7	PBG	11	0	0,00%	11	100,00%	29	0	0,00%	29	100,00%	21	21	100,00%	0	0,00%	19	19	100,00%	0	0,00%				
8	SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI (SLF/PBG)	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	4	4	0,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%				
9	SERTIFIKAT LAYAK HIGIENIS SEHAT (PIRT)	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	4	4	0,00%	0	0,00%	5	5	100,00%	0	0,00%				
10	IZIN PENELITIAN	72	72	100,00%	0	0,00%	66	66	100,00%	0	0,00%	91	91	100,00%	0	0,00%	37	37	100,00%	0	0,00%				
11	PKWT/PKWWTT	192	192	100,00%	0	0,00%	178	178	100,00%	0	0,00%	161	161	100,00%	0	0,00%	183	181	98,91%	2	1,09%				
12	IZIN TRAYEK	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%				
13	PIRT	6	6	100,00%	0	0,00%	8	8	100,00%	0	0,00%	13	13	100,00%	0	0,00%	8	7	87,50%	1	12,50%				
14	IUMK	312	312	100,00%	0	0,00%	224	224	100,00%	0	0,00%	473	473	100,00%	0	0,00%	727	727	100,00%	0	0,00%				
15	NON IUMK	8	8	100,00%	0	0,00%	2	2	100,00%	0	0,00%	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%				
16	NIB/IUMK/NON IUMK	320	320	100,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%				
17	IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR & NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%				

O	IZIN	TRIWULAN I					TRIWULAN II					TRIWULAN III					TRIWULAN IV				
		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU		JUMLAH IZIN MASUK	IZIN TERBIT TEPAT WAKTU		IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%
8	TANDA DAFTAR GUDANG	12	12	100,00%	0	0,00%	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	1116	998	89,52%	117	10,48%	1128	719	63,74%	409	36,26%	1674	1271	75,93%	403	24,07%	1556	1513	97,24%	43	2,76%

JUMLAH IZIN MASUK TAHUN 2022	5474	
JUMLAH IZIN TERBIT TEPAT WAKTU TAHUN 2022	4502	82,24%
JUMLAH IZIN TERBIT TIDAK TEPAT WAKTU TAHUN 2022	972	17,76%

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2022**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2	4	3	3	4	3	3	4	3	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	4	3	4	3	3	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	3	4	3	4	3	4	4	3	4
9	3	3	3	4	3	3	4	4	4
10	4	4	3	4	3	3	3	3	3
11	3	3	3	4	3	3	3	4	4
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	4	3	4	4	3	4	3	3	4
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4
15	4	4	4	4	4	3	4	4	4
16	3	4	4	4	4	3	4	4	4
17	3	4	3	4	3	3	4	3	4
18	3	3	3	4	3	3	4	4	4
19	3	3	3	4	3	4	3	3	4
20	4	3	3	4	3	3	4	3	4
21	3	4	3	4	4	4	4	3	4
22	4	3	4	4	3	4	4	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	2	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4
25	4	4	4	4	4	4	3	4	4
26	3	3	3	4	3	4	3	3	4
27	4	3	3	4	4	4	4	4	4
28	3	3	4	4	3	4	4	4	4
29	3	3	4	4	3	3	4	4	4
30	4	4	3	4	3	3	4	3	4
31	3	4	3	4	3	4	3	4	4
32	4	3	3	4	4	4	4	4	4
33	4	3	4	4	4	4	4	3	4
34	4	4	4	4	4	4	3	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	4	3	4	4	3	4	4	4	4
37	4	4	3	4	3	4	4	4	4
38	4	3	3	4	4	3	4	3	4
39	3	3	2	4	3	2	3	2	3
40	3	4	4	4	3	3	4	3	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	4	3	3	4	4	4	4	4	4
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4
45	4	3	3	4	3	3	3	4	4
46	4	3	3	4	3	3	4	4	4
47	3	4	3	4	3	4	3	4	3
48	3	3	3	4	3	3	4	3	4
49	4	4	3	4	3	3	3	3	4
50	3	3	3	4	3	3	3	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No RHS	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
107	3	3	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	3	3	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	3	4	3	4	4	4	4	4	4
113	3	3	3	4	4	4	4	4	4
114	3	4	4	4	4	4	4	4	4
115	3	4	3	4	4	4	4	4	4
116	4	4	3	4	4	4	4	4	4
117	3	3	3	4	4	4	4	4	4
118	3	3	3	4	4	4	4	4	4
119	3	4	3	4	4	4	4	4	4
120	4	4	3	4	4	4	4	4	4
121	3	4	4	4	4	4	4	4	4
122	3	4	4	4	4	4	4	4	4
123	3	4	4	4	4	4	4	4	4
124	3	3	2	4	4	4	4	4	4
125	3	3	3	4	4	4	4	4	4
126	3	3	3	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	3	3	4	4	4	4	4	4
130	3	3	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	3	3	4	4	4	4	4	4
133	4	3	3	4	4	4	4	4	4
134	3	3	3	4	4	4	4	4	4
135	3	3	3	4	4	4	4	4	4
136	3	3	3	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	3	3	4	4	4	4	4	4
139	3	3	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	3	4	4	4	4	4	4
141	3	3	3	4	4	4	4	4	4
142	3	3	3	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	3	3	3	4	4	4	4	4	4
145	3	3	3	4	4	4	4	4	4
146	4	4	3	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	3	3	3	4	4	4	4	4	4
149	3	4	4	4	4	4	4	4	4
150	4	3	3	4	4	4	4	4	4
151	3	3	3	4	4	4	4	4	4
152	3	3	3	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	3	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	3	3	4	4	4	4	4	4
158	3	4	4	4	4	4	4	4	4
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	4	4	4	4
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	4	4	4
239	4	4	4	4	4	4	4	4	4
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	4	4	4	4	4	4	4	4	4
243	4	4	4	4	4	4	4	4	4
244	4	4	4	4	4	4	4	4	4
245	4	4	4	4	4	4	4	4	4
246	4	4	4	4	4	4	4	4	4
247	4	4	4	4	4	4	4	4	4
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4
251	4	4	4	4	4	4	4	4	4
252	4	4	4	4	4	4	4	4	4
253	4	4	4	4	4	4	4	4	4
254	4	4	4	4	4	4	4	4	4
255	4	4	4	4	4	4	4	4	4
256	4	4	4	4	4	4	4	4	4
257	4	4	4	4	4	4	4	4	4
258	4	4	4	4	4	4	4	4	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	4	4	4	4	4	4	4	4	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	4	4	4	4	4	4	4	4	4
266	4	4	4	4	4	4	4	4	4
267	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	4	4	4	4	4	4	4	4	4
269	4	4	4	4	4	4	4	4	4
270	4	4	4	4	4	4	4	4	4
271	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4

**CAPAIAN REALISASI INVESTASI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

No	Nama Perusahaan PMA	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
1	PT. VALE INDONESIA TBK	592.118.186.127		642.552.931.446	503.727.956.543	1.738.399.074.116
					918.728.882.273	918.728.882.273
2	PT MARS SIMBIOSINCE	16.393.204.400		473.550.062	178.174.150	17.044.928.612
3	PT MARS SIMBIOSINCE					-
4	PT. ARKHORA HIDRO		90.304.504.522,81	90.304.504.523	90.304.504.523	270.913.513.568
5	BAU HUA					-
6	PT. PANCA DIGITAL SOLUSION		550.000.000		1.400.000.000	1.950.000.000
7	PT. PANCA DIGITAL SOLUSION				200.000.000	200.000.000
	TOTAL PMA	608.511.390.527,00	90.854.504.523	733.330.986.031	1.514.539.517.489	2.947.236.398.569

No	Nama Perusahaan PMDN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
1	PT. GUNUNG VERBECK KAREBBE	22.000.000.000				22.000.000.000
2	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA	6.000.000	2.000.000			8.000.000
3	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA		43.000.000			43.000.000
4	PT. MELATI SUKSES MANDIRI	300.000.000				300.000.000
5	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI			451.000.000		451.000.000
6	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI			30.000.000		30.000.000
7	CV. MAHAPATI UTAMA	1.075.000.000				1.075.000.000
8	CV. MAHAPATI UTAMA	430.000.000				430.000.000
9	PT. SINAR ADHIO	80.000.000				80.000.000
10	PT. PUTRA WASUPONDA MANDIRI	196.000.000	46.000.000		162.000.000	404.000.000
11	PT. PUTRA WASUPONDA MANDIRI		350.000.000			350.000.000
12	PT. AOS ARROYAN JAYA	40.000.000				40.000.000
13	PT. RISTON BUMI MAHARDIKA	1.997.000.000	75.000.000			2.072.000.000

14	PT. TANA TIMUR PROPERTI	1.255.000.000			450.000.000	1.705.000.000
15	CV. DWI ANUGERAH PRATIWI	135.000.000				135.000.000
16	CV. DWI ANUGERAH PRATIWI	84.000.000				84.000.000
17	PT. PUMA JAYA UTAMA	650.000.000			100.000.000	750.000.000
18	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	1.637.500.000	850.000.000			2.487.500.000
19	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	9.000.000				9.000.000
20	PT. NICKEL PRIMA UTAMA		1.930.000.000	2.200.000.000		4.130.000.000
21	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	70.700.000			21.165.000	91.865.000
22	PT. TEGUH WIRA PRATAMA (10431)	111.842.061.086	79.587.630.283		50.930.000	191.480.621.369
23	PT. TEGUH WIRA PRATAMA		420.000.000.000		-	420.000.000.000
24	PT. TEGUH WIRA PRATAMA (01262)		10.000.000			10.000.000
25	PT. TEGUH WIRA PRATAMA (10431)		155.050.000		4.676.081.803	4.831.131.803
26	PT. USU HYDRO POWER	19.123.083.018	576.116.891		20.381.315.772	40.080.515.681
27	CV. MAHAPATI UTAMA	215.000.000				215.000.000
28	PT. ARTA NAARGA PERSADA		93.000.000.000			93.000.000.000
29	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	450.000.000	450.000.000			900.000.000
30	PT. ANEKA JASA SOROWAKO	1.500.000.000	9.247.214.547		26.750.315.056	37.497.529.603
31	PT. ANEKA JASA SOROWAKO		7.997.214.547			7.997.214.547
32	PT. ANEKA JASA SOROWAKO		-			-
33	PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK		110.988.139.342	9.500.000.000		120.488.139.342
34	CV. ADITYO TANGGUH PERKASA			128.000.000		128.000.000
35	PT. KAHALA MINERA		40.000.000	1.403.000.000	46.301.128	1.489.301.128
36	PT. MAHARANI SYAM					-
37	PT. TEGUH WIRA PRATAMA					-
38	PT. TEGUH WIRA PRATAMA			79.587.630.283		79.587.630.283
39	PT. TEGUH WIRA PRATAMA					-

40	CV. BENTENG RADIO SYSTEM	-	54.000.000			54.000.000
41	PT. LAUTAN INTAN MATANO	-	-			-
42	PT. ANGKASA JASA MULIA		346.874.791	25.000.000	9.464.974	381.339.765
43	PT. ANGKASA JASA MULIA				22.399.496	22.399.496
44	PT. EPID MENARA ASSETCO			2.000.000.000		2.000.000.000
45	PT. FARISA UTAMA KONSTRUKSI	37.000.000		55.000.000	55.000.000	147.000.000
46	PO. SUHARYANTO	-				-
47	PT. INDOMARCO	-				-
48	PT. SUMBER WAHAU JAYA		220.000.000			220.000.000
49	PT. ANEKA JASA SOROWAKO		9.247.214.547	10.520.435.443		19.767.649.990
50	PT. WIRANA BEVELINDO HUTAMA		150.000.000			150.000.000
51	PT. NICKEL PRIMA UTAMA		1.910.000.000	1.930.000.000		3.840.000.000
52	PT. HARRY PRATAMA SOROWAKO		506.000.000	(NOL) tambahan		506.000.000
53	PT. ANUGRAH ADHI SANTHY		(Not) tambahan	(Not) tambahan		-
54	PT. TRI ADETA PRATAMA		20.240.937			20.240.937
55	CV. QAIRAH PRATAMA		280.000.000			280.000.000
56	PT. DESTRA AIR MAS		500.000.000		500.000.000	1.000.000.000
57	PT. BUJAYA KARYA MAKMUR		375.000.000			375.000.000
58	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	450.000.000			275.000.000	725.000.000
59	PT. HARINDO GAS UTAMA	-	-			-
60	PT. UNITED TRACTORS	-	-			-
61	PT. TRAKINDO UTAMA	-	10.000.000			10.000.000
62	PT. TANA TIMUR PROPERTI	-	253.000.000		450.000.000	703.000.000

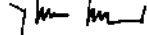
63	PT. TANA TIMUR PROPERTI		25.000.000		1.316.500.000	1.341.500.000
64	PT. TANA TIMUR PROPERTI		1.958.500.000			1.958.500.000
65	PT. SINAR KASIH SOROAKO		1.150.000.000			1.150.000.000
66	PT. ANUGRAH ADHI SANTHY		400.000.000			400.000.000
67	PT. WIRANA BEVELINDO HUTAMA		150.000.000			150.000.000
68	PT. BARUGA MANDIRI PRATAMA		252.000.000			252.000.000
69	CV. PAKALA KEMBAR JAYA		45.000.000			45.000.000
70	CV. AZ-ZAHRA (68111)		130.000.000	55.000.000		185.000.000
71	CV. AZ-ZAHRA		27.200.000			27.200.000
72	PT. BERLIAN NUHA PERSADA		255.000.000			255.000.000
73	CV. INDO MULIA KARYA		9.000.000			9.000.000
74	CV. INDO MULIA KARYA		7.000.000			7.000.000
75	PT. ADHWA SELARAS ABADI		77.000.000			77.000.000
76	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		556.000.000			556.000.000
77	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		435.000.000		490.000.000	925.000.000
78	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		175.900.000			175.900.000
79	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		42.000.000			42.000.000
80	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		43.000.000			43.000.000
81	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		326.100.000			326.100.000
82	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		25.700.000			25.700.000
83	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		26.200.000			26.200.000
84	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		523.300.000			523.300.000
85	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		1.250.000.000			1.250.000.000
86	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		214.900.000			214.900.000
87	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		307.000.000			307.000.000
88	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		62.400.000			62.400.000
89	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		136.500.000			136.500.000
90	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA		504.800.000			504.800.000

91	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI	1.052.000.000		30.000.000	1.082.000.000
92	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI	1.636.000.000			1.636.000.000
93	CV. TIGA LAKSANA	25.000.000			25.000.000
94	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY	550.000.000			550.000.000
95	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY	25.000.000			25.000.000
96	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY	950.000.000			950.000.000
97	PT. HADJI KALLA	-		75.958.834	75.958.834
98	PT. HADJI KALLA	-			-
99	CV. SARAMAI MANDIRI	-		5.000.000	5.000.000
100	CV. SARAMAI MANDIRI	125.000.000			125.000.000
101	PT. PONGKERU MUTIARA ABADI	410.000.000			410.000.000
102	PT. WAHANA MULTI NIAGA	805.400.000			805.400.000
103	PT. RISYANIPATRA MANDIRI	650.000.000			650.000.000
104	PT. BINTANG MANDIRI VERBEK	600.000.000			600.000.000
105	PT. ARTHAVEST PUTRA ANANTAMA	204.000.000			204.000.000
106	PT. HJ LA TUNRUNG COCOA PLANTATION		108.717.000		108.717.000
107	PT. MANDIRI PALMERA AGRINDO		28.473.310.999		28.473.310.999
108	PT TUNAS DWIPA MATRA		194.779.193		194.779.193
109	PT TUNAS DWIPA MATRA			101.770.103	101.770.103
110	PT MOJONG MITRA MAJU			60.000.000	60.000.000
111	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA		1.514.484.796	1.514.484.796	3.028.969.592

112	CV BATARA PERTALIINDO		72.250.000		72.250.000
113	PT SUMBER RAHMAT PERTIWI			192.907.217	192.907.217
114	PT NUSANTARA INDO PROPERTI PALOPO			680.000.000	680.000.000
115	PT PUMA JAYA UTAMA			1.500.000.000	1.500.000.000
116	PT PUMA JAYA UTAMA		500.000.000		500.000.000
117	PT PUMA JAYA UTAMA			650.000.000	650.000.000
118	PT PUMA JAYA UTAMA			750.000.000	750.000.000

119	PT CENTRAMATAMA MENARA INDONESIA				550.000.000	550.000.000
120	PT PRIMA UTAMA LESTARI				20.688.363.851	20.688.363.851
121	PT. DAYA INDAH YASA			194.444.444		194.444.444
122	PT. DAFFA SAPUTRA JAYA				800.000.000	800.000.000
123	PT ALE LUWU RAYA			2.000.000.000		2.000.000.000
124	PT HARINDO GAS UTAMA				500.000.000	500.000.000
125	PT.SURYA WARSA ABADI					
126	PT.PUMA JAYA UTAMA				5.000.000	5.000.000
127	PT. PUMA JAYA UTAMA				2.500.000	2.500.000
128	PT.PUMA JAYA UTAMA				1.000.000	1.000.000
129	PT. ANGKASA JASA MULIA				22.399.496	22.399.496
130	CV. TRIHAR UTAMA					
131	PT. GERBANG HARAPAN MULTIERA (46900)				1.085.000.000	1.085.000.000
	TOTAL PMDM	163.582.344.104,00	755.366.595.885	140.943.052.158	84.970.857.526	1.144.862.849.673
	TOTAL PMA	608.511.390.527,00	90.854.504.523	733.330.986.031	1.514.539.517.489	2.947.236.398.569
	TOTAL PMA DAN PMDM	772.093.734.631,00	846.221.100.408	874.274.038.189	1.599.510.375.014,81	4.092.099.248.242,43

Malili 10 Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP


ANDHAHIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 196412311987031208

**TARGET PERTRIWULAN PMA DAN 3,3 T
UNTUK TW I**

PMA	625.000.000.000
PMDN	200.000.000.000

Keterangan

TW 1 TOTAL PMA & PMDN = 25 PELAKU USAHA

PMA = 2

PMDN = 23

TW 2 TOTAL PMA & PMDN = 48 PELAKU USAHA

PMA = 2

PMDN = 46

TAMBAHAN PELAPOR = 30

TW 3 TOTAL PMA & PMDN = 23 PELAKU USAHA

PMA = 3

PMDN = 20

TAMBAHAN PELAPOR = 8

TW 4 TOTAL PMA & PMDN = 25 PELAKU USAHA

PMA = 4

PMDN = 21

TAMBAHAN PELAPOR = 11